

**PERAN HAJI AGUS SALIM SEBAGAI MENTERI LUAR NEGERI
INDONESIA DAN PENGARUHNYA BAGI KEDAULATAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1946-1949**

Favian Fajri Pahlevi¹
ryuseufajri02@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia serta pengaruhnya bagi kedaulatan Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode historis atau metode penelitian sejarah yang melalui empat tahapan yakni; heuristik, verifikasi, intepetasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yakni; pengangkatan Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri bukan hal yang salah, karena ia memiliki kecakapan berbagai bahasa dan mampu berdiplomasi dengan baik dengan negara-negara Timur Tengah dan dunia Internasional. Terbukti ia memiliki peran penting dalam diplomasi dengan dunia Internasional yang terjadi pada peristiwa; Konferensi Antar Asia di New Delhi, Pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN), misi diplomatik ke Mesir dan Negara Timur Tengah, Perundingan Renville dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Pada peristiwa-peristiwa tersebut, Haji Agus Salim piawai dan cerdas membaca situasi dengan mencari dukungan negara-negara Timur Tengah dan PBB untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Disamping itu kepiawaiannya dalam melakukan lobby baik di forum resmi dan non-formal mampu meyakinkan dan mempengaruhi dunia Internasional mengakui kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci : *Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri, Diplomasi, Kedaulatan Indonesia*

Pendahuluan

Rentetan dari peristiwa pasca kemerdekaan yaitu lahirnya Kabinet Presidensial, suatu kabinet pertama di Negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet pertama ini terdiri dari 11 Kementerian Sedangkan untuk melengkapi bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 16, maka pada tanggal 25 September 1945 Presiden telah mengangkat. Para anggota Dewan

¹ Favian Fajri Pahlevi adalah mahasiswa tingkat akhir Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuludin dan Adab, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Pertimbangan Agung (DPA) yang berjumlah sebelas orang, di antaranya ialah Haji Agus Salim. Badan ini mempunyai kewajiban menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah.²

Haji Agus Salim sebagai salah satu tokoh yang pada masa sebelum kemerdekaan memiliki peranan penting dalam membuat dasar dan sistem ketatanegaraan Indonesia serta ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Ia kembali menunjukkan eksistensinya dengan masuk dalam pemerintahan RI. Setelah proklamasi kemerdekaan, terbentuklah kabinet presidensial dibawah pimpinan presiden Soekarno. Pada waktu itu Haji Agus Salim memang tidak duduk dalam kabinet, namun setelah Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, Ia terpilih sebagai anggota. Dalam sistem kabinet presidensial, fungsi dan kedudukan presiden sangat sentral karena disamping berfungsi sebagai kepala negara Ia juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Kedua peran tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat.³

Perubahan sistem pemerintahan dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer mengakibatkan berdirinya kabinet parlementer pertama dibawah pimpinan Sutan Syahrir. Tiga kali berturut-turut Sutan syahrir memegang kursi pemerintahan yaitu dalam kabinet Syahrir I, II, dan III. Pada kabinet Syahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946) Haji Agus Salim tidak duduk dalam jajaran kabinet, ia ditugasi saat itu sebagai penasihat Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo.⁴

Pada kabinet Syahrir II yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946 Agus salim ditunjuk sebagai menteri luar negeri muda, dengan sutan syahrir yang langsung merangkap jadi menteri luar negeri. Kabinet Syahrir II ini diberi mandat kekuasaan yang jelas oleh KNIP dalam sidangnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1946. Mandat ini meliputi; mengadakan perundingan dengan para penguasa Belanda atas dasar pengakuan penuh kedaulatan RI, menyiapkan pembelaan bagi RI, menyusun suatu dasar demokratis untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan tingkat propinsi, menyelenggarakan pengadaan produksi secara maksimum dan pembagian barang-barang secara adil, dan menjalankan perkebunan dan industri penting dengan pengawasan pemerintah. Oleh karena, dibutuhkannya pengakuan kedaulatan terhadap RI atas kerajaan Belanda, maka dimulailah sejumlah perundingan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan perundingan Linggajati.⁵

Permasalahan yang akan penulis jadikan sebagai masalah utama adalah

² Rafid Ari Martdana, *Peran Haji Agus Salim Dalam Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia(1945-1949)*, Universitas Negeri Semarang, 2015, hal. 5.

³ *Ibid*, hal. 5.

⁴Rahman, *Peran Diplomasi Hadji Agus Salim dalam Kemerdekaan Indonesia (1942-1954)*,2018, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2 hlm. 142

⁵ *Ibid*, hal. 146

bagaimana peran Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan Pengaruhnya bagi kedaulatan Republik Indonesia tahun 1945-1950. Metode yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan adalah metode historis atau metode sejarah dengan empat tahapan yakni; heuristik, verifikasi, intrepetasi dan historiografi. Melalui empat langkah ini diharapkan membantu penulis dalam menemukan fakta dan data tentang perjuangan Haji Agus Salim dalam membantu mendapatkan kedaulatan Republik Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Haji Agus Salim dalam Konferensi Antar Asia di New Delhi

Pada 22 Oktober 1946 hingga 15 November 1946 diadakan Sepuluh Tahap perundingan linggarjati. Isi perjanjian linggarjati pada intinya, berisi: Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Dengan demikian, proses berlangsungnya pembuatan perjanjian Linggajati itu sendiri sudah merupakan pengakuan *de facto* Kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Sesudah dua hari membicarakannya di bulan November 1946 kabinet memutuskan memberikan kuasa kepada delegasi RI untuk menandatangani perjanjian linggajati dan kabinet berpegang teguh kepadanya. Moh. Hatta menyatakan di hadapan seribu mahasiswa di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1946 bahwa perjanjian linggajati itu harus dipandang sebagai saat istirahat dan batu loncatan menuju tahap perjuangan berikutnya untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang mencakup seluruh Hindia Belanda dahulu. Jadi, pembatasan atas kedaulatan yang disetujui oleh delegasi RI itu bersifat sementara dan berguna menghimpun kekuatan.⁶

Disi lain Indonesia tengah melakukan hubungan diplomatik dengan dunia Internasional salah satunya adalah India. Hubungan Republik Indonesia dengan India dimulai sejak April 1946 ketika Syahrir menawarkan untuk memberikan beras yang sangat dibutuhkan India saat itu. Suatu langkah politik yang terselubung dalam gerakan manusiawi. Bila tawaran itu diterima, maka berarti RI mendapat suatu pengakuan sebagai negara yang mandiri dalam pergaulan internasional. Dikemukakan pula oleh Syahrir, bahwa kedudukan pemerintah India dinilai penting bagi upaya pengakuan kedaulatan RI. Selain itu, dengan diadakannya Konferensi Antar Asia (*Inter-Asian Relations Conference*) di New Delhi, India, pada bulan Maret 1947 ini akan memberikan kesempatan pula bagi

⁶ *Ibid*, hal. 147

Indonesia untuk mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga.⁷

Negara-negara yang simpati kepada Indonesia bukan hanya di kawasan Asia Tenggara saja. Sejak semula, RI telah mendapat simpati sepenuhnya dari Mesir dan negara-negara Liga Arab lainnya. Orang di jalan raya turut membicarakan tentang negeri ini, sesama negeri Islam yang sedang berjuang untuk kemerdekaannya melawan Belanda. Liga Arab mengutus Mohammad Abdul Mun'im, seorang Konsul Jendral Mesir di Bombay, untuk membawa pesan kepada pemerintah Indonesia. Sekitar November 1946, tersiar berita bahwa Liga Arab di Kairo memutuskan untuk menganjurkan anggotanya untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Kedatangan utusan Liga Arab itu sudah tentu sangat menggembirakan bagi kalangan politik Indonesia.⁸

Pada hari Sabtu, 15 Maret 1947, Mohammad Abdul Mun'im menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab mengenai keputusan sidang Dewan Liga Arab (DLA) pada tanggal 18 November 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan dan kekeluargaan. Selanjutnya, Mohammad Abdul Mun'im mendesak agar Indonesia mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus mengikuti Konferensi Antar Asia (KAA) di New Delhi India, yang menurutnya pasti akan sangat bermanfaat untuk proses pengakuan kedaulatan Indonesia.⁹

Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri saat itu (Kabinet Syahrir III), akhirnya menyetujui untuk menghadiri Konferensi Antar Asia (KAA). Menurutny, dengan pergi ke New Delhi India akan memberikan dampak yang baik dalam upaya memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia. Maka para delegasi RI berangkat untuk menghadiri Konferensi Antar Asia di New Delhi pada bulan Maret tahun 1947. Para delegasi itu diantaranya Abdurrahman Baswedan (Menteri Penerangan RI), Rasyidi (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), Mr. Nazir St. Pamunjtak dan Haji Agus Salim sebagai pimpinan delegasi diplomat RI. Misi diplomatik yang diembannya yaitu berusaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan dukungan dari negara-negara di Asia.¹⁰

Delegasi Indonesia sampai di New Delhi India tanggal 23 Maret pukul 04.30 pagi. Kedatangan delegasi disambut di bandara oleh Appadorai (Sekretaris *Inter Asia Conference*) dan Punjabi. Di New Delhi, mereka disambut dengan pekik "merdeka" dan lencana merah putih oleh penduduk. Konferensi ini dibuka dengan resmi pada tanggal 24 Maret 1947 pada pukul 17.00 oleh Pandit Jawaharlal Nehru di Purana Quita dan konferensi ini diketuai oleh Mrs. Sarojini

⁷ Fauzi, *Haji Agus Salim: Diplomat Dari Negeri Kata-Kata, Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2, 2019, hal. 111.

⁸ *Ibid*, hal. 112

⁹ *Ibid*, hal. 112

¹⁰ *Ibid*, hal. 113

Naidu. Haji Agus Salim berpidato pada acara pembukaan sebagai wakil dari pemerintah Indonesia dan kepala delegasi Indonesia. Kira-kira 250 wakil yang datang dari 32 negara yang menghadiri konferensi ini. Negara-negara itu antara lain India, Birma (Myanmar), Indonesia, Filipina, Ceylon (Sri Lanka), Malaysia, Mesir, Afghanistan, Tibet, Australia, Siam, Palestina, Indo-cina, Cina dan Republik USSR (Uni Soviet). Pada hari itu, seluruh delegasi dari seluruh negara, pada pukul 11.00 akan mengunjungi Pandit Jawaharlal Nehru untuk bercakap-cakap dan beramah-tamah.¹¹

Maksud dan sifat dari Konferensi Antar Asia hanya akan memperbincangkan masalah-masalah kebudayaan, sosial dan ekonomi, yang besar artinya bagi perhubungan antara bangsa-bangsa di Asia. Di dalam konferensi tersebut tidak dibicarakan mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara-negara peserta konferensi. Meskipun demikian, harus kita pahami bahwa secara tidak langsung, kedaulatan Indonesia sebenarnya sudah diakui secara *de facto* oleh seluruh peserta konferensi yang hadir. Tidak adanya penolakan akan kehadiran Indonesia di konferensi tersebut telah memberikan indikasi bahwa Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat, bukan negara boneka ataupun negara jajahan. Pada pukul 13.00, delegasi Indonesia ditemui oleh utusan dari penduduk Indonesia di Andaman (sisa dari 1.100 romusha yang dipekerjakan oleh Jepang), yang karena menolak jasa-jasa pemerintah Belanda untuk dapat pulang ke Indonesia yang hidup dalam keadaan keterbatasan. Mereka mengatakan bahwa dari jumlah 1.100 orang yang dibawa oleh Jepang ke Pulau Andaman, kini hanya tinggal 485 orang dan ingin segera pulang ke tanah air. Mendengarkan hal itu, Haji Agus Salim berjanji akan segera mengambil tindakan yang perlu untuk menolong mereka, supaya secepatnya pulang ke Indonesia.¹²

Pada waktu pelaksanaan Konferensi Antar Asia (KAA) di New Delhi, sosok Haji Agus Salim mendapat perhatian masyarakat India karena lincah, aktif dan suka bergaul dengan siapa saja. Selera humornya yang tinggi, serta ditunjang dengan pengetahuannya yang luas, menjadikan sosok Haji Agus Salim populer dalam pertemuan-pertemuan di kalangan diplomatik, terutama juga karena ia memahami hal-hal kehidupan dalam beretika di dunia diplomatik. Karena diplomasi politik yang dilakukan oleh Haji Agus Salim, sehingga banyak negara-negara Islam satu demi satu mengakui serta menyokong perjuangan Indonesia. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Haji Agus Salim adalah perintis jalan yang membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan dunia luar. Selain Haji Agus Salim, ternyata delegasi Indonesia sangat populer diantara delegasi-delegasi yang lain. Orang-orang India yang berjumpa dengan delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih atas bantuan beras Indonesia.

¹¹ Wildan dan Neni Nurmayanti, *Op. Cit*, hlm. 7

¹² *Ibid*, hal. 8

Pada forum ini, meskipun tidak secara resmi membicarakan mengenai pengakuan kedaulatan, tetapi Haji Agus Salim berpidato mengemukakan dan menjelaskan perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Selain menghimbau negara-negara di Asia untuk mengakui kedaulatan Indonesia, di dalam Konferensi Antar Asia (KAA) itu, Haji Agus Salim juga telah menghimbau agar delegasi negara-negara Arab untuk mengakui negara Indonesia secara *de jure*.¹³ Dengan perang opini yang dilancarkannya, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda, berhasil meraih simpati dari peserta Konferensi Antar Asia (KAA) dan kedudukan Belanda semakin terjepit.¹³

Selain menjalankan misi diplomatiknya secara formal, Haji Agus Salim juga aktif bertemu dan bertukar pikiran dengan pemerintah India (yang masih bersifat interim), pemimpin-pemimpin dari *Indian National Congress* dan *All India Muslim League*, seperti Pandit Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah. Haji Agus Salim juga menghadiri *garden parties* (jamuan yang diadakan di kebun gedung atau rumah) yang diselenggarakan oleh pemimpin-pemimpin *Indian National Congress* dan *All India Muslim League*. Hal ini memberikan gambaran, bahwa yang dimaksud dengan politik diplomasi itu tidak selalu harus berada di dalam situasi yang formal, misalnya saja dengan berpidato, tapi bisa juga dengan *garden parties* atau acara santai lainnya, yang di dalamnya juga terdapat praktek diplomasi yang terselubung, yang terkenal dengan melobi (*lobby*).¹⁴

Kekuatan melobi dalam kegiatan politik diplomasi tidak bisa dianggap upaya sebelah mata, kadang dengan suasana yang tidak formal, maka melalui pendekatan melobi, lawan bicara kita, akan lebih mengerti dan menerima pendapat kita. Selain meletakkan hubungan politik dan diplomatik dengan India, PM Syahrir juga menghendaki melebarkan hubungan diplomatik RI dengan negara-negara lain, misalnya dengan negara-negara Arab, karena Indonesia dengan negara-negara itu diikat oleh hubungan agama yaitu agama Islam.¹⁵

Peran Diplomasi Haji Agus Salim dalam Membangun Misi diplomatik ke Mesir dan Negara Timur Tengah

Kekuatan melobi dalam kegiatan politik diplomasi tidak bisa dianggap upaya sebelah mata, kadang dengan suasana yang tidak formal, maka melalui pendekatan melobi, lawan bicara kita, akan lebih mengerti dan menerima pendapat kita. Selain meletakkan hubungan politik dan diplomatik dengan India,

¹³ Fauzi, *Op. Cit*, hlm. 113

¹⁴ *Ibid*, hal. 113

¹⁵ *Ibid*, hal. 114

PM Syahrir juga menghendaki melebarkan hubungan diplomatik RI dengan negara-negara lain, misalnya dengan negara-negara Arab, karena Indonesia dengan negara-negara itu diikat oleh hubungan agama yaitu agama Islam.¹⁶

Dari sanalah Haji Agus Salim bersama rombongan berangkat menuju Kairo. Komposisi delegasi, juga dipandang sangat lengkap. Selain terdapat seorang politisi yang mempunyai pengalaman diplomasi seperti Haji Agus Salim, dalam rombongan itu, ikut serta ahli hukum (Mr. Nazir Pamuncak), ahli agama dan bahasa Arab (Prof. Dr. Rasyidi), ahli militer (Mayjen Abdul Kadir) dan seorang wartawan kawakan (AR Baswedan) yang juga seorang Menteri Muda Penerangan. Dipilihnya Haji Agus Salim untuk melobi Negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia adalah hal yang tepat.¹⁷

Tidak lama sesudah tiba di Kairo, delegasi Indonesia mengadakan jumpa pers. Sebelum acara itu dimulai, delegasi Indonesia membagikan UUD 1945 yang sudah ditulis dalam bahasa Inggris kepada peserta yang hadir. Sebagai ketua delegasi, Haji Agus Salim membeberkan sejarah dan perjuangan RI sejak zaman Belanda. Ketika itulah, tampak nyata kelincahan Haji Agus Salim dalam menjawab semua pertanyaan wartawan dalam dialog terbuka yang berlangsung, terutama dalam bahasa Arab. Sebagai seorang cendekiawan yang berpengetahuan luas, Haji Agus Salim selalu siap dengan panjang lebar membahasnya dengan cerdas, tanpa melewatkan humornya yang khas.¹⁸

Perjuangan para delegasi di Mesir, tidaklah mudah. Mereka menemui banyak rintangan, salah satunya adalah sulitnya bertemu dengan anggota-anggota Liga Arab, PM Nokrashi Pasha dan tentu saja Raja Farouk yang memegang kunci masalah pengakuan kedaulatan terhadap RI. Tata cara diplomatik Mesir yang sangat formal itu, harus dilalui. Beruntung sekali, delegasi Indonesia dibantu oleh Mohammad Abdul Mun'im. Ia yang mengatur semua kontak dengan pihak-pihak resmi, bahkan menurut A.R. Baswedan, seakan-akan ia adalah salah seorang delegasi Indonesia.¹⁹

Selama tiga bulan berada di Kairo, delegasi RI memanfaatkan dengan baik waktu tersebut untuk menyampaikan informasi dan penjelasan mengenai RI, serta usaha Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini disampaikan delegasi Indonesia kepada tokoh-tokoh pemerintah, masyarakat, pers dan Duta Besar - Duta Besar negara-negara Arab yang berkedudukan di Kairo. Selain itu, sebagai duta keliling RI, Haji Agus Salim juga berbicara tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.²⁰

¹⁶ Wild, C. dan Peter Carey (Penyusun). (1986). *Gelora Api Revolusi*. Jakarta : Gramedia, hlm. 56

¹⁷ Wildan, et. Al, *Op, Cit*, hal. 116

¹⁸ *Ibid*, hal. 116

¹⁹ *Ibid*, hal. 116

²⁰ Fauzi, *Op, Cit*, hal. 13

Pada akhirnya, dengan diantar oleh Abdul Mun'im, delegasi RI menghadap Raja Farouk di Istana *Qasr Abidin*. Dengan ramah, Raja Farouk menerima para delegasi RI dan berkata bahwa karena persaudaraan Islam-lah, Mesir membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara ini. Terbukti bahwa Raja Farouk menaruh minat dan perhatian yang besar terhadap Indonesia.

Pada tanggal 10 Juni 1947, delegasi RI diantar Abdul Mun'im menuju Kementerian Luar Negeri Mesir sekitar pukul 9 pagi untuk menghadiri upacara penandatanganan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. Sehari sebelumnya sudah disiarkan di koran-koran, bahwa Kabinet Mesir telah memutuskan untuk menyetujui ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan kerja sama di bidang sosial ekonomi dengan Indonesia. Berita itu tentu saja mengejutkan Duta Besar Belanda. Rintangan dari Duta Besar Belanda ini, cukup mengganggu gerak diplomasi delegasi Indonesia. Duta Besar Belanda itu menyatakan bahwa usaha Haji Agus Salim dan rombongannya itu melanggar perjanjian Linggarjati. Tentu saja itu adalah tafsiran Duta Besar Belanda sendiri atas instruksi pemerintah Belanda.²¹

Drooglever mengakui, Belanda yang mencoba menggagalkan penandatanganan perjanjian tersebut, ternyata tidak berhasil mengubah sikap pemerintah Mesir sekalipun wakilnya waktu itu seorang bangsawan bernama Graaf W. C. van Rechteren Limburg²². Wakil dagang Belanda di Mesir, Mr Stockdijk menanggapi berita kemungkinan penandatanganan itu dengan sikap sinis. Ia yakin, tidak bakal terjadi hal tersebut mengingat kepentingan dagang dan ekonomi antara kedua negara tersebut sangat besar. Tetapi ternyata perkiraan tersebut meleset, sebab Haji Agus Salim dan Nokrashi Pasha akhirnya menandatangani perjanjian itu.²³

Ketika Graaf Limburg mengunjungi PM Nokrashi Pasha untuk mengkritik keras perjanjian itu, PM Nokrashi malah kembali mengkritik keras Duta Besar Belanda itu dan menyatakan keheranannya karena Belanda tidak mau mengakui sepenuhnya kemerdekaan dan kedaulatan RI. Selain itu, PM Nokrashi Pasha menjawab sebagai negara yang berdaulat dan berdasarkan Islam, Mesir tidak bisa berkata tidak dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam, karena hal ini telah menjadi tradisi bagi bangsa Mesir. Setelah mendengar jawaban dari PM Nokrashi Pasha, maka Duta Besar Belanda itu keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa dan berwajah masam.²⁴

Naskah perjanjian itu akhirnya ditandatangani. Haji Agus Salim

²¹ *Ibid*, hal. 14

²² Graaf van Revhteren Limpurg adalah seorang bangsawan yang berasal dari keluarga ningrat van Rechteren-Limpurg.

²³ *Op, Cit*, hal. 116

²⁴ *Ibid*, hlm. 117

menandatangani perjanjian persahabatan antara RI dengan Mesir di Kairo yang terdiri dari lima pasal dan ditulis dalam tiga bahasa, yaitu Perancis, Arab dan Indonesia. Perjanjian persahabatan itu ditandatangani oleh Haji Agus Salim sebagai wakil dari RI, sedangkan dari pihak Mesir, ditandatangani oleh PM Nokrashi Pasha, dan disaksikan oleh Dr. Nazir Sutan Pamunjtak, Rasyidi, Abdul Mun'im, Abdurahman Baswedan serta Dr. Kamil (Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri Mesir). Selain itu, Indonesia-Mesir juga mengadakan perjanjian perdagangan.²⁵

Ditandatanganinya perjanjian persahabatan dan didapatnya pengakuan kedaulatan Indonesia dari Mesir pada 1947, tidak lepas dari dukungan organisasi Islam yang terkenal di Mesir, *Ikhwanul Muslimin*. Melalui desakan *Ikhwan Muslimin* yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna, Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan *Ikhwanul Muslimin* kepada Indonesia tidak terlepas dari salah satu tujuan utama pendidikan politik *Ikhwanul Muslimin*, yaitu memperkokoh kesadaran dan sensitivitas terhadap kewajiban membebaskan negara Islam dari kekuasaan asing dan menyingkirkan penjajah dari negara-negara Islam dengan menggunakan sarana yang ada.

Dukungan itu juga tidak terlepas dari perasaan cinta sesama Muslim. Atas dukungannya ini, delegasi Indonesia yang terdiri dari Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mr. Nazir Pamoentjak, M. Rasyidi dan M. Zein Hassan menyampaikan rasa terima kasih bangsa Indonesia kepada Hasan Al-Banna di kantor pusat *Ikhwanul Muslimin*, Kairo. Pengakuan Mesir secara *de facto* dan *de jure* terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tahun 1947 adalah salah satu bukti kemahiran Haji Agus Salim dalam berdiplomasi. Bahkan, salah satu koran nasional di Indonesia menyebutnya dengan *The Grand Old Man Salim* propagandist Repoeblik di Mesir.²⁶

Hingga saat ini, Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, selain negara-negara yang tergabung dalam Liga negara-negara Arab yang mengakui Indonesia pada tahun 1947:²⁷

Perjanjian persahabatan ini adalah sebuah realisasi pengakuan seluruh negara-negara Arab (Timur Tengah) terhadap RI. Hal ini adalah suatu pengakuan pertama kali yang diberikan oleh dunia internasional, meskipun seluruh dunia masih ragu terhadap kemerdekaan Indonesia.²⁸ Karena sebagian besar kekuatan dunia internasional berpihak kepada Belanda. Negara-negara Arab tanpa ragu-ragu sedikitpun memberikan pengakuan terhadap kedaulatan RI tanpa

²⁵ *Ibid*, hlm. 117

²⁶ Tn, Berita Indonesia, 12 November 1947, hlm. 4

²⁷ Suhatno et al, *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta : DEPDIKBUD, 1995, hlm. 14

²⁸ Zufri, S, *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Gunung Agung, 1981, hlm. 30

memperhitungkan akibat-akibat internasional.²⁹

Selain itu, dapat dikatakan bahwa Mesir adalah penggerak Liga Arab yang secara gigih membantu Indonesia memperoleh akreditasi internasional pada masa-masa sulit. Penandatanganan perjanjian persahabatan ini ini, kemudian secara luas diakui sebagai pangkal kemenangan diplomasi Indonesia. Dengan pelaku utamanya, Haji Agus Salim, dianggap sebagai orang yang berpengaruh dalam terlaksananya perjanjian persahabatan antara Indonesia- Mesir, yang juga diakui kedaulatan Indonesia oleh Mesir. Baik orang-orang Indonesia yang menyaksikan perjuangan Haji Agus Salim, maupun para pejabat Mesir kala itu, mengakui kehebatan Haji Agus Salim dalam cara meyakinkan orang terhadap perjuangan kemerdekaan serta memperkenalkan negara baru yang bernama Indonesia ke dunia internasional. Maka wajar, apabila tanggal 10 Juni 1947 dapat diabadikan sebagai “Hari Diplomasi Republik Indonesia” atau sebagai “Hari Kebangkitan Diplomasi RI” yang setiap tahunnya diperingati oleh Departemen Luar Negeri maupun oleh perwakilan-perwakilan RI di luar negeri.³⁰

Hal ini dijadikan sebagai ungkapan dan penghormatan atas pengakuan dan penghargaan tertinggi yang diberikan Departemen Luar Negeri terhadap pahlawan diplomasi RI atas perjuangannya, khususnya Haji Agus Salim. Sepanjang sejarah diplomasi Indonesia, peristiwa itu merupakan kejadian penting yang patut dicatat secara khusus, karena untuk pertama kalinya sejak proklamasi, RI menandatangani perjanjian internasional dengan sebuah negara asing. Dengan ini, RI berhasil mendobrak dan menerobos blokade diplomasi Belanda yang terus hendak mengingkari eksistensi RI.

Pasca pengakuan Mesir atas kedaulatan Indonesia, negara-negara Arab dan negara lainnya terus menerus menunjukkan dukungannya kepada Indonesia. Pemerintah Libanon mengakui RI pada tanggal 29 juni 1947, Suriah mengakui RI pada tanggal 2 Juli 1947 dengan menandatangani Perjanjian Persahabatan kedua negara, Afghanistan mengakui RI pada tanggal 23 September 1947, Birma mengakui RI pada tanggal 23 November 1947, Arab Saudi mengakui RI pada tanggal 24 November 1947 dan Yaman mengakui RI pada tanggal 5 November 1947. Keberhasilan delegasi Indonesia dalam meraih simpati dan pengakuan kedaulatan adalah hasil dari politik damai yang dijalankan pemerintah Indonesia yang juga merupakan kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan Haji Agus Salim.³¹

Peran Diplomasi Haji Agus Salim pada peristiwa pembentukan Komisi Tiga Negara

Krisis politik di Hindia Belanda pada bulan Mei-Juni 1947, kembali

²⁹ *Ibid*, hlm. 14

³⁰ Wildan, et.al, *Op,Cit*, hlm 117

³¹ *Ibid*, hlm. 144

menarik perhatian Inggris dan Amerika Serikat, karena Belanda dan Indonesia gagal mencapai kata sepakat dalam hal pembagian wilayah. Kedua negara tersebut mempunyai investasi modal di Hindia Belanda, karenanya seperti juga Belanda mereka ingin agar ekonomi segera normal kembali dan perdagangan luar negeri Hindia Belanda bisa lancar sebagaimana sebelumnya. Namun, jika RI tidak mau menerima tawaran Belanda, tanggal 27 Mei, mereka khawatir Belanda akan melancarkan aksi militer untuk menyerang Indonesia. Oleh karena itu, Inggris dan Amerika Serikat menekan Belanda untuk segera mencapai kesepakatan dengan Indonesia mengenai masalah wilayah dan menekan Indonesia juga untuk menerima usul- usul Belanda.³²

Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militernya yang pertama kepada Republik Indonesia, serangan ini lebih dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I (*Politionele actie*) dan merupakan interpretasi tersendiri pihak Belanda terhadap Persetujuan Linggarjati. Pemerintah Belanda beranggapan, bahwa pemerintah Indonesia tidak kuasa lagi menjamin keamanan dan keadilan. Sehari setelah Belanda melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia, Sutan Syahrir berhasil lolos dan dapat melarikan diri ke luar negeri dengan tugas sebagai duta keliling I.³³

Serangan Belanda atas Replik Indonesia ini mendapat protes, kritik serta reaksi dari berbagai negara lain. Para mahasiswa dan buruh di Australia melakukan protes. Selain itu, pemerintah India dan Pakistan, melarang pesawat terbang milik Belanda (KLM), terbang dan mendarat di wilayah kekuasaan mereka. Pemerintah Syria juga ikut mengajukan protes keras kepada Dewan Keamanan PBB, sedangkan pemerintah Australia memberikan instruksi kepada wakilnya di Dewan Keamanan PBB agar secara resmi pertikaian antara Indonesia dan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Australia juga mengusulkan supaya Dewan Keamanan PBB menyampaikan kepada kedua belah pihak agar menghentikan permusuhan, dan pemerintah Amerika Serikat mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB menawarkan jasa-jasa baiknya dan pemerintah Republik Indonesia sendiri menginginkan *arbitrase* di bawah pengawasan PBB.³⁴

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya:³⁵

³² Wildan, et.al, *Op,Cit*, hal. 116

³³ Agresi Militer I dilatarbelakangi oleh pelanggaran Belanda atas Perjanjian Linggarjati, dan ingin membentuk negara federal untuk melemahkan Indonesia. Dengan demikian, Belanda dapat menguasai kembali sumber daya alam Indonesia yang penting untuk pemasukan Belanda. *Ibid*, hlm. 117

³⁴ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*. Jakarta : Pertjetakan Ofsett Kawa, 1971, hlm. 21

³⁵ Sriyono, A. Agus , et.al, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2004, hlm. 43

- a. Seruan agar RI dan Belanda menghentikan permusuhan, diputuskan bahwa Indonesia dan Belanda harus menghentikan peperangan;
- b. Menyelesaikan perselisihan dengan bantuan komisi arbitrase atau cara damai lainnya; dan
- c. Melaporkan kepada DK PBB segala kemajuan yang dicapai. Menyikapi hal ini, RI segera menerima resolusi DK PBB dengan harapan nantinya dapat meningkatkan status dari pengakuan de facto ke pengakuan penuh sebagai negara berdaulat.

Pada tanggal 2 Agustus 1947, utusan Amerika Serikat mengumumkan bahwa AS telah menawarkan jasa baiknya dalam pertikaian Belanda-Indonesia dan utusan Belanda menerima hal itu. Sikap yang berbeda ditunjukkan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda baru menjalankan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB itu pada tanggal 4 Agustus 1947. Belanda berhasil menduduki Jawa Barat, daerah-daerah sekitar Semarang, sebagian dari daerah Jawa Timur, Madura dan daerah-daerah sekitar Medan, Palembang dan Padang. Pada saat yang bersamaan, Panglima tertinggi Angkatan Perang RI memerintahkan untuk menghentikan peperangan. Pada tanggal 5 Agustus 1947, Sutan Syahrir bersama Haji Agus Salim tiba di New York. Selama berada di kota tersebut, delegasi Indonesia dibantu seorang pegawai tinggi RI yang tinggal di kota tersebut bernama Tambu.³⁶

Seminggu sesudah itu, selama perkara Indonesia-Belanda dipersoalkan, delegasi RI diterima menjadi anggota Dewan Keamanan, sedangkan orang-orang Indonesia yang dikirim Belanda untuk memperkuat delegasinya ditolak.³⁷ Di dalam Dewan Keamanan PBB, perwakilan diplomat Indonesia tidak dapat dengan mudah untuk mengemukakan pendapatnya di dalam sidang Dewan Keamanan PBB karena Belanda tidak menghendaki itu terjadi. Tetapi Australia terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima satu usulan yang sebelumnya telah diperdebatkan oleh Australia pada tanggal 31 Juli, yaitu bahwa wakil Indonesia hendaknya diperbolehkan mengikuti perdebatan-perdebatan di sidang Dewan Keamanan tentang masalah sengketa Indonesia dengan Belanda.³⁸

Perwakilan Amerika Serikat mengatakan bahwa justru Republik Indonesia perlu memberikan penjelasan. Pembelaan Amerika Serikat merupakan terobosan yang sangat baik bagi proses diplomasi di forum internasional ini. Amerika Serikat menjadi salah satu negara adidaya pasca terjadinya Perang Dunia II. Pada waktu itu, Amerika Serikat menjadi negara donatur bagi negara-negara Eropa yang mengalami kehancuran pasca Perang Dunia II. Dengan pembelaan Amerika Serikat, berarti Indonesia sudah mempunyai dukungan dari negara yang

³⁶ Wildan, et.a, *Op,Cit*, hlm. 147

³⁷ George, *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta : PT. Pantja Simpati, 1989, hm. 41

³⁸ *Ibid*, hlm. 42

kuat, dan hal ini dianggap sebagai keberhasilan lain dari proses diplomasi Indonesia.³⁹

Utusan dari India dan Rusia mempunyai pemikiran yang sama dengan Amerika Serikat dan Australia, namun pihak Belanda yang diwakili oleh van Kleffens, tetap menghendaki Dewan Keamanan PBB menolak keikutsertaan Indonesia dalam sidang. Van Kleffens mengatakan bahwa Indonesia bukanlah suatu negara yang berdaulat dan tidak menganggap dirinya sebagai negara. Hal itu dibuktikan dengan surat Presiden Soekarno kepada pemerintah Amerika, yang mengakui bahwa “kekuasaan sepenuhnya sampai 1 Januari 1949 masih tetap berada di tangan pemerintah Belanda.” Perdebatan terus berlangsung, hingga akhirnya dilakukan pemungutan suara. Di samping India, Rusia dan Amerika, wakil-wakil Polandia, Cina, Australia dan Kolombia (7 suara) menyatakan setuju mengikutsertakan Indonesia, sedangkan Belgia, Inggris dan Perancis memihak Belanda. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, ketua sidang mengundang wakil-wakil Republik Indonesia untuk mengambil tempat dalam ruangan sidang. Kemudian ketua sidang memperkenalkan anggota-anggota delegari Republik Indonesia kepada forum. Ketua: Sutan Syahrir, anggota: Haji Agus Salim (Wakil Ketua), Tambu, Sujatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo.⁴⁰

Sidang berikutnya, tanggal 14 Agustus 1947, Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim diberi izin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan Indonesia sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia di dunia internasional terutama dalam sidang PBB. Dengan penguasaan bahasa yang baik, struktur bahasa yang tersusun rapi, kecakapan berbicara serta penyampaian yang lugas dan rasional tentang kebobrokan kebijakan politik Belanda di Indonesia dari Haji Agus Salim, maka semakin banyak negara-negara yang simpati terhadap perjuangan Indonesia. Haji Agus Salim dapat memberi pengertian tentang sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan menceritakan keadaan di Indonesia.⁴¹

Pidato Haji Agus Salim ini dapat mengubah banyak pendapat dan pandangan-pandangan wakil-wakil negara yang sebelumnya percaya begitu saja pada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Belanda. Menurut Sutan Syahrir, pada Agustus 1947 di dalam Sidang Dewan Keamanan PBB, sedang terjadi perdebatan mengenai Agresi Militer Belanda I atas wilayah Indonesia, berkat ketangkasan dan diplomasi Haji Agus Salim di *Lake Success* New York Amerika Serikat, maka pandangan dunia khususnya Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang pada awalnya bersikap “dingin”, berubah menjadi simpati untuk membantu

³⁹ *Ibid*, hlm. 41

⁴⁰ Wildan, et.al, hlm. 41

⁴¹ *Ibid*, hlm. 148

perjuangan Indonesia.⁴²

Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim berbicara dan mendesak PBB agar membentuk panitia pemisah dalam persengketaan Indonesia-Belanda di dalam sidang itu. Wakil pemerintah Belanda terus membantah pernyataan-pernyataan yang keluar dari pihak Indonesia, malah Belanda menuduh Dewan Keamanan PBB menyerahkan berjuta-juta rakyat Indonesia kepada Republik yang bukan negara sah. Tetapi tuduhan Belanda ditolak oleh wakil Indonesia, dan meminta agar Dewan Keamanan mengirimkan komisi internasional untuk mengawasi gencatan senjata. Usaha Belanda untuk menghalang-halangi pembentukan panitia pemisah persengketaan itu tidak berhasil.⁴³

Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dapat menyangkal semua pernyataan yang menyudutkan dari pihak Belanda. Mereka dapat menunjukkan bahwa Indonesia pantas untuk merdeka karena Indonesia telah memiliki syarat-syarat yang mutlak sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Indonesia telah memiliki pemerintahan, rakyat, Undang-Undang Dasar 1945 dan wilayah. Sehingga sudah sepantasnya Indonesia sah menjadi negara merdeka. Mereka menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dampak yang diakibatkan dari Agresi Militer I Belanda yang terjadi 21 Juli 1947 adalah penjajahan atas negara Indonesia yang melanggar kode etik kemanusiaan.

Sejak peristiwa itu, protes, kritik dan reaksi yang keras dari negara lain bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di Asia dan Afrika, bahkan beberapa dari negara-negara itu telah mengakui kedaulatan Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan yang dipaparkan oleh Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim ini, akhirnya Dewan Keamanan PBB menyetujui untuk membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), karena di mata Dewan Keamanan PBB, adanya Republik Indonesia dipandang sebagai sengketa internasional dan ditakutkan menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. Akhirnya Dewan Keamanan memutuskan agar Belanda dan Indonesia memilih negara ketiga untuk menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa. Berikut teks resmi keputusan Dewan Keamanan PBB:⁴⁴

- a. Agar Indonesia membuat laporan yang sesungguhnya mengenai keadaan di Indonesia.
- b. Pembentukan Komisi Tiga Negara yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.

Akibat keputusan Dewan Keamanan ini, maka pada tanggal 6 September 1947, Kabinet Amir Syarifudin atas usul Haji Agus Salim meminta agar Australia bersedia menjadi negara pertama dalam Komisi Tiga Negara (KTN), sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai negara ketiganya. Setelah itu, pihak Australia

⁴² *Ibid*, hlm. 148

⁴³ *Ibid*, hlm. 149

⁴⁴ Departemen Luar Negeri, *Op,Cit*, hlm. 36

dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai negara penggenap dari KTN. Alasan pemilihan Australia sebagai mitra untuk Indonesia diasumsikan karena faktor kedekatan, dan karena Australia adalah negara kuat bawahan Inggris yang tentu saja memiliki keuntungan politis apabila Australia dapat digandeng oleh pemerintah Indonesia. Alasan lain juga karena faktor kedekatan geografis, ataupun karena faktor kedekatan emosional karena Australia sering melakukan kritik, reaksi dan protes terhadap Belanda atas penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Diasumsikan ini yang menjadi pertimbangan Haji Agus Salim ketika memilih Australia. Dengan kemahirannya berdiplomasi, khususnya melobi, maka Haji Agus Salim dapat memengaruhi dan meyakinkan Australia, akan banyak dampak yang positif yang akan diterima Australia apabila mendukung perjuangan Indonesia, misalnya saja dengan investasi ekonomi.⁴⁵

KTN mulai menjalankan tugasnya dua hari kemudian, mereka menuju Yogyakarta dalam usaha berunding dengan pihak Indonesia. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa perundingan Indonesia-Belanda akan diawasi KTN dan akan diadakan di tempat yang netral yang disetujui kedua belah pihak. Meskipun KTN sudah memulai tugasnya di Indonesia, tetapi perjuangan diplomasi di luar negeri masih berlangsung. Bersama Syahrir di Washington, mereka bertemu dengan *de feitelijke regering* New York, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan di Wallstreet (Pusat Industri Keuangan di New York). Delegasi Indonesia mengajak untuk membuka hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini dimaksudkan agar mereka mau untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Haji Agus Salim mengatakan bahwa :⁴⁶

“Penjelesaian satoe-satoenja jang bergoena bagi doenia ialah kembalinja Indonesia ke dalam perhoeboengan dagang doenia. Djadi penjelesaian jang mendjamin kerdja sama Indonesia dengan doenia dalam soal ekonomi.”

Bagi delegasi Indonesia, dengan membuka hubungan dagang dengan para dengan negara bisnis itu, akan mempunyai keuntungan bagi Indonesia. Pertama, roda perekonomian Indonesia bisa lebih maju dengan adanya investasi luar negeri. Kedua, ajakan investasi itu merupakan cara delegasi Indonesia agar secara langsung atau tidak langsung, Amerika Serikat mau mengakui keberadaan Indonesia ataupun mereka terdorong untuk membantu Indonesia dalam memperoleh pengakuannya di dunia internasional dengan “iming-iming” investasi. Kita harus pahami bersama, bahwa adanya hubungan ekonomi antara dua negara, dapat dilakukan jika dua negara itu berdaulat dan saling mengakui kedaulatan masing-masing, sehingga ajakan menanamkan investasinya di Indonesia akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 37

⁴⁶ Wildan, et.al, *Op,Cit*, hlm. 148

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 149

Upaya diplomasi inilah yang menjadi keunikan diplomasi Haji Agus Salim dalam pembentukan Komisi Tiga Negara. Selain dapat meyakinkan pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung pengakuan kedaulatan Indonesia, Haji Agus Salim juga berhasil meyakinkan para investor Amerika Serikat di *Wallstreet* untuk mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia. Penawaran kerja sama dagang dengan para *de feitelijke regering* ini adalah suatu misi pengakuan kedaulatan yang terselubung. Hal ini membuktikan bahwa kemahiran politik diplomasi Haji Agus Salim telah membawa keuntungan yang baik bagi Indonesia.⁴⁸

Melalui perantaraan Komisi Tiga Negara (Australia, Amerika Serikat dan Belgia), pertikaian antar Indonesia- Belanda ditengahi. Hal ini menyebabkan terlaksananya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, pada 1949. Konferensi Meja Bundar berakhir pada 27 Desember 1949 dengan tercapainya pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Dengan pembentukan KTN, maka langkah Indonesia dalam merasakan iklim kedaulatan sudah semakin dekat.

Dampak positif yang bisa diambil dengan terbentuknya Panitia Jasa Baik atau yang kita kenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN), adalah persengketaan antara Indonesia- Belanda dapat dibicarakan dalam forum Dewan Keamanan PBB. Dengan membicarakan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda di dalam sebuah forum internasional, tanpa disadari, sebenarnya Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda. Inilah cikal-bakal kedaulatan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dan hal ini tidak terlepas dari kerja keras para diplomat Indonesia yang berunding di dalam forum internasional.

Setelah Komisi Tiga Negara mulai bekerja, maka Haji Agus Salim pun pulang ke tanah air. Bertempat di rumah Perdana Menteri Amir Syarifuddin di jalan Pegangsaan, Haji Agus Salim menuturkan kesan-kesan dan pengalamannya:⁴⁹

“Bahwa kita di Indonesia ini selamanya melihat ke arah jang djaoeh sadja sehingga sangat terasa beratnja oesaha- oesaha kita mentjapai jang ditoedjoe. Kita senantiasa beratnja perdjoeangan, sehingga kadang-kadang loepa apa jang soedah kita tjapai. Akan tetapi, bila telah di loear negeri, terasalah bahwa hasil-hasil jang telah kita dapat ini adalah sesoeatoe jang mengagoemkan doenia umumnja. Seloeroeh Asia berpendapat dan merasa bahwa apa jang kita lakukan di Indonesia adalah sesoeatoe jang beloem pernah terdjadi dalam sedjarah Asia. Di India, walapoen dari kita, rakjat di sana tidak merasa poeas. Begitoe pula dengan Birma, sehingga kalau ditanjakan kepada kedoea bangsa ini, tjara mana jang lebih baik mendapat kemerdekaan negara, maka mereka akan mendjawab dalam hatinya “Tjara di Indonesia jang memoeaskan”.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 149

⁴⁹ Wildan, et. al, hlm. 149

Penderitaan dan kesoelitan jang kita rasakan tidak boleh menjebakkan kita lekas ketjewa, sebaliknya kita haroes memperkoeat tekad kita. Djanganlah kita sekarang lekas menoedoeh-noedoeih dan salah menjalahkan, karena dengan ini kita bisa membenarkan pendirian lawan dengan tak setahoe kita.”

Peran Haji Agus Salim Pada Peristiwa Perundingan Renville dan Meja Bundar

Pada tanggal 27 Oktober 1947 anggota KTN datang di Indonesia. Dua hari kemudian mereka menuju Yogyakarta dalam usaha berunding dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa perundingan Indonesia-belanda yang diawasi oleh KTN akan diadakan di tempat netral yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya diputuskan bahwa perundingan diadakan di kapal perang *renville*, kemudian perundingan ini dikenal dengan sebutan perundingan Renville. Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Coa si Kien, Mr. Mohd. Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Juanda. Sedangkan wakil-wakil Belanda terdiri dari Van Vredenburg, Abdulkadir Wijatmojo, Dr. Sooumokil, Pangeran Kertanegara dan Zulkarnaen.⁵⁰

Perundingan Renville berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dan menelorkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Abdul Kadir sebagai wakil Belanda sedangkan pemerintah Negara Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin. Di antara putusan perjanjian Renville menyatakan baik tentara Belanda maupun Indonesia harus ditarik mundur di belakang garis demarkasi, yaitu daerah kosong (daerah tidak bertuan) dan biasanya disebut daerah/garis status quo. Garis demarkasi itu merupakan batas daerah yang diduduki oleh tentara Belanda di satu pihak dan pemerintah Indonesia di lain pihak, sesuai dengan proklamasi pemerintah Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947. Dalam perundingan Renville ini komisi Tiga negara memberikan sumbangan tentang prinsip tambahan di dalam usaha menyelesaikan politik terutama mengenai soal prosedur pembentukan negara Indonesia serikat dan pemerintahan dalam masa peralihan.⁵¹

Perjanjian Renville tidak membawa kebahagiaan bagi negara Republik Indonesia dan pemerintahannya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, maka partai Masyumi dan PNI mencabut wakil- wakilnya yang duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kedua partai itu yang ikut serta bertanggungjawab atas adanya perundingan *renville*, tetapi pada akhirnya malahan membubarkan kabinetnya sendiri. Akibatnya karena kegawatan situasi dalam pembentukan kabinet, maka Presiden Sukarno menunjuk wakil presiden Mohhammad Hatta untuk membentuk

⁵⁰ Abd. Rahman, *Op, Cit*, hlm. 153

⁵¹ Abd. Rahman, *Op, Cit*, hlm. 154

kabinet presidensial.⁵²

Kabinet Hatta yang pertama ini terdiri dari 17 kementerian. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dijabat oleh Hatta sendiri. Sedangkan jabatan Menteri luar negeri dipercayakan kepada Haji Agus Salim. Meskipun kabinet sudah diganti ternyata suasana di dalam negeri semakin bertambah keruh dengan timbulnya pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948 yang dapat dipadamkan oleh Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Oktober 1948. Belanda melihat kesempatan ini, maka dengan segera mengadakan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.⁵³

Setelah meletusnya agresi yang kedua ini, yang dimulai dengan serangan Belanda secara mendadak berhasil menduduki pangkalan udara Maguwo. Pendaratan tentara payung di pangkalan udara Maguwo tidak mengalami perlawanan yang berarti. Pendaratan itu dilakukan jam 02.00 malam hari. Perjalanan menuju ke kota Yogyakarta juga hanya mengalami perlawanan kecil-kecilan, hal ini disebabkan karena Tentara Republik Indonesia sengaja mengundurkan diri ke luar kota. Pada jam 16.00 kota Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda. Tentara Republik Indonesia mengundurkan diri dari kota, bersiap-siap untuk melakukan perang gerilya. Pada waktu itu para pemimpin Republik Indonesia yang berada di kota Yogyakarta sedang membicarakan situasi politik, di Istana Presiden. Diputuskan dalam sidang itu untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara, yaitu kemakmuran yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera.⁵⁴

Mandat Presiden kepada Mr. Safruddin itu ditandatangani oleh Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Diantara bunyi mandat itu sebagai berikut: "Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah menyerang ibukota. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka kami menugaskan dan menguasai kepada Mr. Safruddin Prawiranegara, Menteri kemakmuran republik Indonesia unruk membentuk pemerintahan Republik Darurat di Sumatera". Dikabarkan pula pada dr. Sudarsono, Palar dan Mr. A.A Maramis di New Delhi untuk membentuk *Exile Government* (Pemerintah dalam Pengasingan) Republik Indonesia di India, bila ikhtiar Mr. Safruddin Prawiranegara tidak berhasil.⁵⁵

Instruksi ini ditandatangani oleh Presiden sendiri dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Semua pemimpin yang berada di Istana negara ditawan oleh pemerintah Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk meneruskan perang gerilya. Menteri-menteri Susanto

⁵² *Ibid*, hlm. 154

⁵³ *Ibid*, hlm. 114

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 115

⁵⁵ Mukayat. *Haji Agus Salim., Op,Cit*, hlm. 80

Tritoprojo, Kasimo dan Lukman Hakim berhasil meloloskan diri dan ikut serta dalam melaksanakan perang gerilya. Sebagian pemimpin-pemimpin yang lain menyerahkan diri dengan tujuan untuk dapat selalu berhubungan dengan Komisi Tiga Negara, sehingga perjuangan politik dan perjuangan fisik dapat dilaksanakan.⁵⁶

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Desember 1948 mengeluarkan resolusi yang isinya agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan para pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan. Tetapi pihak Belanda tidak mau melaksanakan resolusi itu, akibatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusinya yang lebih keras dan lebih terperinci, sehingga terpaksa wakil Belanda menyerah, tetapi tetap menghindarkan pelaksanaan resolusi itu. Sebelum Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 28 Januari 1949, perdana menteri Jawaharal Nehru dari India berhasil mengadakan konferensi yang dihadiri oleh 21 negara dan konferensi itu terkenal dengan nama konferensi New Delhi.⁵⁷

Isi konperensi itu sangat menguntungkan Indonesia, karena desakan-desakan dari dewan keamanan PBB dan opini dari negara-negara Islam di Timur Tengah serta Konferensi New Delhi terpaksa Belanda mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia yang pada akhirnya lahir persetujuan Roem-Royen, itulah Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta dan pada tanggal 30 Juni 1949 adalah hari bahagia bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 presiden Sukarno, wakil presiden Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.⁵⁸

Setelah konferensi antar Indonesia maka pada tanggal 23 Agustus 1949 lahir konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Delegasi Indonesia saat itu diketuai oleh Mohammad Hatta termasuk di antaranya Haji Agus Salim. Pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditandatangani piagam persetujuan tentang Konstitusi RIS dan pada tanggal 16 Desember 1949 dilangsungkan pemilihan Presiden untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta yang dilakukan oleh wakil-wakil dari 16 Negara Bagian. Pilihan jatuh pada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1949 pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat.⁵⁹

Demikian alur peristiwa dalam memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan bangsa Indonesia, hingga perundingan di Den Hag Belanda tahun 1949 yang pada akhirnya mengakui secara *de Jure* kemerdekaan Indonesia,

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 81

⁵⁷ Wildan, et.al, *Op,Cit*, hlm. 107

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 108

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 109

walaupun beberapa kesepakatan didalamnya terasa sangat kontroversial. Tetapi yang jelas Indonesia diakui baik secara *de facto* maupun secara *de jure*. Dalam memperoleh pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di dunia Internasional ini, hingga berakhirnya agresi pertama hingga meletusnya agresi kedua, kita telah melihat peran yang tidak ada absen dari sosok Hadji Agus salim. Perjuangannya Haji Agus Salim cukup membuat kelelahan kerajaan Belanda, dan telah membuat sebagian besar negara-negara di dunia mengakui kedaulatan Indonesia dan menyokong atas pengakuan kedautan tersebut secara Internasional.⁶⁰

Kesimpulan

Sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa revolusi, Haji Agus Salim berperan penting dalam melakukan diplomasi politik pada peristiwa; Konferensi Antar Asia di New Delhi, Pembentukan Komisi Tiga Negara, misi diplomatik ke Mesir dan Negara Timur Tengah, Perundingan Renville dan Konferensi Meja Bundar di Denhag. Pada peristiwa-peristiwa tersebut, Haji Agus Salim piawai dan cerdas membaca situasi dengan mencari dukungan negara-negara Timur Tengah dan PBB untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Disamping itu kepiawaiannya dalam melakukan lobby baik di forum resmi dan non-formal mampu meyakinkan dan mempengaruhi dunia Internasional mengakui kemerdekaan Indonesia.

Referensi

- Rafid Ari Martdana, *Peran Haji Agus Salim Dalam Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia(1945-1949)*, Universitas Negeri Semarang, 2015
- Rahman, *Peran Diplomasi Hadji Agus Salim dalam Kemerdekaan Indonesia (1942- 1954)*,2018, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2
- Fauzi, *Haji Agus Salim: Diplomat Dari Negeri Kata-Kata*, *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2, 2019,
- Wildan Insan Fauzi dan Neni Nurmayanti Hasanah, *Diplomasi Dari Negeri Kata-Kata(Diplomasi Haji Agus Salim pada Inter Asian Relation Conference dan Komisi Tiga Negara)*, Bandung: Historia Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 2017
- Wild, C. dan Peter Carey (Penyusun), *Gelora Api Revolusi*. Jakarta : Gramedia, 1986
- Graaf van Revhteren Limpurg adalah seorang bangsawan yang berasal dari keluarga ningrat van Rechteren-Limpurg.
- Tn, Berita Indonesia, 12 November 1947
- Suhatno et al, *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta : DEPDIBUD,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 109

1995

Zufri, S, *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Gunung Agung, 1981

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*. Jakarta : Pertjetakan Offset Kawa, 1971

Sriyono, A. Agus , et.al, *Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2004

George, *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta : PT. Pantja Simpati, 1989